

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI DESA MOME KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA BERDASARKAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Nayla Greis Sela Novita Tiara Pidar, Florence O. Moroki, Andrew P. Marunduh

Universitas Negeri Manado, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Tondano
e-mail: pidarnella@gmail.com

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengelolaan dana bantuan langsung tunai di desa Mome Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan dekriptif. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan, menganalisis, merumuskan serta menarik kesimpulan terkait pengelolaan dana bantuan langsung tunai di desa Mome. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana bantuan langsung tunai di Desa mome dilaksanakan belum efektif verdasar indikator ketepatan sasaran program dikarenakan pada pemilihan calon penerima bantuan dinilai belum layak untuk menerima bantuan, namun pengelolaan serta penyaluran dana bantuan langsung tunai (BLT) dinilai sudah akuntabilitas berdasarkan prinsip good corporate governance dan indikatornya telah sesuai yaitu laporan pertanggungjawaban, adanya SOP, dan sistem pengawasan pada penyaluran pengelolaan BLT.

Kata Kunci: Efektivitas, akuntabilitas, BLT, prinsip GCG.

Abstract: The purpose of this study is to analyze village financial management activities starting from planning to accountability using the Village Financial System (SISKEUDES). The type of research used is qualitative research with a descriptive approach. In data collection the author uses observation, interview and documentation methods. Data analysis was carried out in a qualitative descriptive manner by collecting, analyzing, formulating and drawing conclusions related to financial management based on SISKEUDES at the Sumarayar Village Office. The results showed that the SISKEUDES application by Sumarayar Village since 2017 and was very helpful in village financial management, namely planning, implementation, administration, reporting and accountability, but in practice there are still those who are not in accordance with the Regulation where administrative activities do not report to the Village Head every month but will report when activities or programs have been completed and also on activities reporting does not provide reporting to Regional Heads in accordance with the above regulations, namely the first semester report, but the existence of SISKEUDES makes financial management more effective and detailed and subsequently must be maximized and followed according to existing regulations.

Keywords: Village Financial System (SISKEUDES), Financial Management.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Good Corporate Governance merupakan salah satu alat reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru, banyak upaya yang dilakukan pemerintah dalam menciptakan iklim *Good Corporate Governance* yang baik, antara lain mulai mengupayakannya transparansi informasi terhadap publik sehingga memudahkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menciptakan kebijakan dan dalam proses pengawasan serta pengelolaan APBN. Tata kelola perusahaan yang baik diterapkan tidak hanya oleh pemerintah pusat tetapi juga oleh pemerintah desa, Desa mempunyai otonominya

sendiri, yang berarti desa tersebut mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya

Pemerintahan desa sering menjadi tolak ukur masyarakat untuk menilai apa yang berhasil pemerintah melakukan pelayanan bagi masyarakat. penduduk mempunyai hak yang lebih dibandingkan dengan hak yang diberikan oleh pemerintah. Pengelolaan keuangan Desa diartikan sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan. Pemerintah melakukan penganggaran untuk desa di seluruh Indonesia pada bantuan langsung tunai bersumber dari dana desa.

Pengelolaan dana desa akan dilakukan oleh aparatur desa yaitu kepala desa, sekretaris dan dibantu dengan perangkat yang berwenang, dengan adanya pemerintah desa beserta aparatur desa dapat mempermudah penyaluran bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang membutuhkan dengan harapan dana tersebut dapat diberikan sebagaimana mestinya, akan tetapi banyak kasus di desa bahwa masyarakat yang diberikan bantuan BLT tidak sesuai kriteria dan tidak layak untuk menerima bantuan langsung tunai tersebut.

Penyaluran BLT membutuhkan akuntabilitas yang baik dalam pengelolaannya guna untuk mencapai tujuan dengan baik. Jika pemerintah daerah sudah memiliki kapasitas akuntabilitas untuk mempertanggung jawabkan laporan pertanggung jawaban dengan akurat dalam penyaluran BLT dengan memanfaatkan teknologi yang ada sehingga dapat diakses oleh masyarakat, laporan keuangan yang bisa dilihat masyarakat memberikan kemudahan dan menambah kepercayaan kepada pemerintah setempat.

Dana yang ditetapkan pemerintah untuk kebutuhan BLT-Dana Desa sebesar Rp 72 triliun se-Indonesia di tahun 2023, sedangkan tingkat desa mengalokasikan anggaran 20-30% dari total dana desa. Besaran nominal yang diberikan adalah Rp 600.000 setiap bulan kepada masyarakat, keluarga miskin dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Kemudian, untuk 3 bulan selanjutnya akan diberikan sebesar Rp 300.000 setiap bulan. Adapun kriteria sebagai calon penerima BLT-Dana Desa adalah Keluarga Miskin non PKH, yang kehilangan mata pencaharian, belum terdata, dan mempunyai anggota keluarga yang sakit menahun/kronis.

Besarnya anggaran yang diperuntukan bagi desa, pemerintah desa diharapkan dapat melakukan penyaluran dana desa secara efektif. Efektivitas penyaluran Dana Bantuan Langsung (BLT) dana desa meliputi ketepatan waktu, ketepatan perhitungan biaya, ketepatan dalam pengukuran, ketepatan dalam menentukan tujuan, ketepatan dalam melakukan perintah dan ketepatan sasaran. Dana BLT desa yang disalurkan pada desa Mome adalah Rp.190.800.000.00 diharapkan anggaran tersebut dapat terealisasi dengan baik beserta memiliki laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggung jawaban sangat penting untuk menambah kepercayaan masyarakat mengingat banyaknya dana desa yang harus di realisasikan.

KAJIAN TEORI

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik diartikan sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan (pemerintah pusat dan daerah serta unit kerja pemerintahan (pemerintah pusat dan daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik negara (BUMN dan BUMD), universitas dan organisasi nirlaba lainnya.

Dana Desa

Dana Desa merupakan anggaran yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa, ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota untuk digunakan membiayai sebagaimana mestinya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Sumber Pendapatan Desa

Undang-Undang No.6 Tahun (2014) tentang Desa pasal 72 menyatakan bahwa pendapatan desa berasal dari: 1) Pendapatan asli daerah meliputi pendapatan dari usaha, pendapatan aset, swadaya serta partisipasi masyarakat, dan kekayaan desa lainnya yang bisa menghasilkan; 2) Alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 3) Bagi hasil retribusi dan pajak daerah; 4) Alokasi Dana Desa; 5) Bantuan dana dari APBD Provinsi atau APBD kabupaten/kota.; dan 6) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Pengertian Pengelolaan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengelolaan berarti proses, cara atau perbuatan mengelola, sedangkan mengelola berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Kata "Pengelolaan" berasal dari kata dasar "kelola". Pengelolaan adalah hal yang dilakukan oleh perangkat desa untuk penyaluran bantuan langsung tunai, pengelolaan yang dimaksud adalah pengelolaan dana desa.

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

BLT merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang diluncurkan pemerintahan di Indonesia dari sekian banyak program penanggulangan kemiskinan yang menjadi tiga kluster.

Kriteria Calon Penerima BLT

Calon penerima BLT-DD adalah keluarga miskin, baik terdaftar maupun tidak terdaftar (*exclusion error*) dalam Data Jaminan Sosial Terpadu (DTKS), yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) Tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/Pemilik Kartu Prakerja; 2) Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan kedepan), dan 3) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Pengertian Good Governance

Good Governance merupakan suatu pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. maka dapat disimpulkan bahwa *Good Governance* adalah suatu proses pengaturan pemerintahan negara yang kuat dan penuh perhatian, serta produktif dan kuat dengan tetap memelihara daya kerja sama hubungan yang saling menguntungkan antar berbagai negara.

Pengertian Efektivitas

Efektifitas adalah cara untuk mengukur sesuatu yang dilakukan seseorang atau penilaian untuk mengukur hasil tugas atau pekerjaan yang dilakukan apakah sesuai dengan yang di targetkan dan mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Beni (2016) Efektifitas merupakan hubungan antara output dan tujuan atau dikatakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan, dan prosedur dari organisasi.

Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas berasal dari bahasa asing yakni “*accountability*” yang berarti pertanggungjawaban. Akuntabilitas disini memiliki makna keadaan untuk dipertanggungjawabkan ataupun keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. Secara umum, akuntabilitas berarti kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan mengenai kinerja dan tindakan dari badan hukum atau pimpinan suatu organisasi, kepada pihak yang berwenang menerima keterangan atau pertanggungjawaban tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang digunakan untuk menguraikan data dalam bentuk kata-kata. Menurut Saryono (2010) mengungkapkan bahwa studi kualitatif dirancang untuk menyelidiki, menemukan, menjelaskan, dan menjelaskan, kualitas atau keistimewaan dampak social yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau dijelaskan dengan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian.

Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2014) Analisis data adalah sebuah proses mencari dan menyusun sebuah data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan semua data kedalam sebuah kategori yang dapat menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola dan memilih mana yang penting mana yang akan dipelajari dalam sebuah kesimpulan sehingga dengan mudah dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Data yang didapat ini akan dianalisis secara kualitatif dan dijelaskan dalam format deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Efektivitas

Berdasarkan indikator ketepatan sasaran penyaluran dana bantuan langsung tunai di desa mome berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa kriteria penerima bantuan blt belum sesuai karena memiliki pekerjaan yang mampu memenuhi kebutuhan ekonomi, memiliki usaha di desa yaitu usaha kopra sebagai pengepul atau membeli hasil-hasil dari masyarakat lain, serta tidak memiliki keluarga yang sakit kronis, dan juga disabilitas peneliti menarik kesimpulan bahwa yang layak menerima bantuan langsung tunai adalah janda duda yang sudah tua, bisa dikatakan belum efektif pemilihan calon penerima bantuan.

Berdasarkan indikator sosialisasi program menurut beberapa informan adanya musyawarah yang selalu dilaksanakan di kantor desa guna untuk memberikan informasi mengenai penyaluran bantuan langsung tunai kepada masyarakat dengan demikian peneliti menarik kesimpulan bahwa telah dilakukan sosialisasi program dapat dikatakan sesuai.

Berdasarkan indikator tujuan program dan perbandingan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti lapangan yaitu tujuan program untuk mengatasi kemiskinan, untuk membantu perekonomian, untuk mensejahterakan masyarakat miskin yang membutuhkan maka ditarik kesimpulan dengan adanya penyaluran dana bantuan langsung tunai ini sudah sesuai.

Berdasarkan indikator pemantauan program setiap penyaluran bantuan langsung tunai selalu dilakukan evaluasi serta pada saat penyaluran bantuan langsung tunai ada pengawas yang turun dari daerah untuk melaksanakan pemantauan program di desa, maka berdasarkan indikator pemantauan program telah sesuai.

Akuntabilitas

Berdasarkan indikator laporan pertanggungjawaban setiap pengelolaan dana BLT dan penyaluran BLT selalu ada laporan pertanggungjawaban dengan baliho apbdes, ataupun laporan apbdes yang dilakukan aparat desa Mome, berdasarkan indikator tersebut dapat dinilai penyaluran BLT dana desa Mome telah sesuai.

Berdasarkan indikator SOP(Standar Oprational Prosedure) penyaluran BLT selalu melalui surat reggulasi dari tingkat daerah setelah surat perintah disampaikan maka aparat desa akan melaksanakan penyaluran sesuai perintah dan regulasi dari daerah, berdasarkan indikator ini pemerintah desa Mome telah sesuai.

Berdasarkan indikator sistem pengawasan pada penyaluran BLT dana desa Mome bahwa setiap penyaluran BLT adanya pendamping dari tingkat kecamatan serta dari LPMD yang ikut serta dalam penyaluran BLT, berdasarkan indikator ini dinilai telah sesuai.

PEMBAHASAN

Efektivitas

Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan uang tunai kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk membantu perekonomian masyarakat miskin. Dana BLT disalurkan kepada penerimanya sebesar RP 300.000 per bulan hanya untuk masyarakat yang memenuhi kriteria yang akan mendapatkan bantuan tersebut. Dana desa menurut peraturan pemerintah No. 60 tahun 2014 tentang dana desa yang berasal dari APBN adalah dana yang diprioritaskan untuk desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota yang dipakai untuk kepentingan desa (R. Rondonuwu, T. Sumual, C. Kewo).

Bantuan langsung Tunai (BLT) Dana Desa dalam pengelolaannya peneliti melakukan penelitian dengan prinsip Good Corporate Governance, GCG ialah suatu sistem yang kehadirannya bukan hanya formalitas namun keberadaan tata kelola pemerintah yang diyakini sangat berpengaruh dalam menambah nilai kepercayaan masyarakat kepada pemerintah (J. Bohang, T. Sumual, A. Marunduh). Efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan dana pada penyaluran BLT di desa Mome Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Efektivitas merupakan sesuatu yang berhasil dilakukan dan sesuai dengan rencana, efektif atau tidaknya suatu program dapat diukur dengan indikator efektivitas seperti tepat sasaran, sosialisasi program, pencapaian tujuan pada penyaluran BLT dana Desa.

Akuntabilitas

Penyaluran BLT Dana Desa juga diukur dengan akuntabilitas yang merupakan suatu unsur yang ada pada prinsip *good corporate governance* *corporate governance* adalah suatu sistem bagaimana suatu organisasi dikendalikan atau dikontrol (M. Santje, S. Kantohe, F.M. Sumual) akuntabilitas yaitu mampu menyajikan laporan mengenai apa yang dikerjakan, mampu menyajikan informasi yang dapat diakses untuk menambah kepercayaan, pemerintahan yang terbuka, adanya sop serta sistem pengawasan. Berdasarkan hasil wawancara desa Mome Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah menerapkan akuntabilitas yang baik dengan adanya laporan serta SPP (Surat Perintah Pembayaran), baliho dan pengawasan dari pemerintah daerah yang datang ke desa. Akuntabilitas yang diterapkan pemerintah desa terkait penyaluran dana BLT ini telah sesuai dengan prinsip *good corporate governance* dengan indikatornya yaitu akuntabilitas.

Akuntabilitas dan efektivitas sangat penting untuk diterapkan guna mencapai prinsip *good corporate governance*. GCG yang diterapkan pada penyaluran BLT dana desa memiliki banyak manfaat yaitu untuk mencegah korupsi yang sering terjadi diantara pemerintah desa, mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan di desa dan lain sebagainya. *good corporate governance* dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan yang salah satunya adalah meningkatkan kualitas laba yang dilaporkan. Kualitas laba yang baik diharapkan juga

dapat meningkatkan nilai perusahaan. (Kawatu, 2009). Bantuan langsung tunai sangat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan guna memenuhi perekonomian oleh sebab itu besarnya anggaran yang diberikan pemerintah harus sesuai dan tepat sasaran. dari hasil penelitian diperoleh: Dinilai dari indikator sosialisasi program pemerintah sudah baik dalam melakukan sosialisasi program dengan mengundang masyarakat, tokoh masyarakat. Dinilai dari indikator tujuan program sudah baik yaitu untuk membantu perekonomian masyarakat miskin yang membutuhkan. Dinilai dari indikator pemantauan program, program yang dilaksanakan sudah baik dan ada pengawasan dari LPMD.

Akuntabilitas sektor publik erat hubungannya dengan praktik transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak publik (Marunduh & Mawikere, 2013). Akuntabilitas penyaluran BLT dana desa Mome, penyaluran dana BLT telah dilaksanakan sampai dengan bulan mei dan sudah ada laporan pertanggungjawaban, pemerintah desa Mome telah melakukan penyaluran BLT dengan baik dan sudah dilaksanakan sesuai SOP, dan telah dilaksanakan secara transparansi dengan adanya baliho abdes di desa mome yang di pajang di depan kantor desa Mome.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan dana bantuan langsung tunai (BLT) di desa mome kecamatan bintauna kabupaten bolaang mongondow utara dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Berdasarkan hasil penelitian pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di desa Mome pada indikator ketepatan sasaran didapati belum efektif dalam pemilihan sasaran penerima bantuan BLT, dan 2) Berdasarkan hasil penelitian penyaluran BLT dana desa Mome telah akuntabel, dapat dilihat dari hasil penelitian berdasarkan indikator yaitu laporan pertanggungjawaban, SOP, dan sistem pengawasan telah dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bohang, J., Sumual, T. E. M., & Marunduh, A. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Pada BEI Periode 2015-2019. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 2(2), 216–227. <https://doi.org/10.53682/jaim.v2i2.1640>
- Dana, P., Di, D., & Lea, L. (2022). *Analisis Penerapan Good Governance Terhadap Kinerja*.
- Indawati, R. (2022). Efektivitas Penyaluran Program Bantuan Sosial Tunai (Bst) Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar). *Jurnal Administrasi Negara*, 28(1), 24–41. <https://doi.org/10.33509/jan.v28i1.1673>
- Kawatu, F. S. (2009). Mekanisme Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kualitas Laba Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 13(3), 405–417.
- Kusnadi, K., & Anwar, A. P. (2023). Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Padaasih Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 7(1), 59–74. <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v7i1.4462>
- Marunduh, A., & Mawikere, L. (2013). Pengaruh Diskusi Verbal Dalam Review Kertas Kerja Audit Terhadap Kinerja Auditor Pada Kantor Bpk Ri Perwakilan Sulawesi Utara. *Accountability*, 2(1), 176. <https://doi.org/10.32400/ja.2354.2.1.2013.176-184>
- Marwiyah, O. S., Shinta Bella, A., A'yun Zaini, M., Ilmu, J., & Publik, A. (2021). Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19 (Study Kasus Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Di Desa Dringu, Kecamatan dringu, Kabupaten Probolinggo). *Cetak) Journal of Innovation Research and Knowledge*, 1(7), 307.

- Mega, S. (2023). *Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada Siklus Pencairan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Desa Sukodono Bondowoso*. 53.
- Mumu, M. C., Manaroinson, J., & Evinita, L. L. (2018). *KECAMATAN LANGOWAN TIMUR KABUPATEN MINAHASA*. 1(4), 70–77.
- Nafiah, I., & Bharata, R. W. (2021). Analisis Efektivitas dan Dampak Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 di Desa Podosoko. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi*, 6(3), 263–277. <https://doi.org/10.30736/jpensi.v6i3.819>
- Panusunan, M. (2022). *Proses penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat prasejahtera di Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidempuan Batunadua*.
- Parwati, Y. D. P. Y. D. (2023). *EFEKTIVITAS BANTUAN LANGSUNG TUNAI TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19 (Studi kasus di Desa Kajar Kabupaten Pati)*. 19.
- Putri Salsa Nabila. (2022). Optimalisasi Good Governance Dalam Meningkatkan Pengelolaan Anggaran Pemerintah Ke Desa Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Desa Bela Rakyat, Langkat). *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 2(1), 148–156.
- Robial, F. E. D., Tarandung, C., & ... (2023). Efektivitas Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Pelayanan Publik Di Era Digital (Studi Di Kantor Camat Ternate Utara Kota Ternate). *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5, 4293–4302.
- Rondonuwu, R., Sumual, T. E. M., & Kewo, C. L. (2021). Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Kayuwi Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 1(3), 56–65. <https://doi.org/10.53682/jaim.v1i3.611>
- Sani, F., & Annisa, A. (2019). Penerapan Asas Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. *Tjyybjb.Ac.Cn*, 27(2), 635–637.
- Santje, M., Kantohe, S., Sumual, F. M., & Manado, U. N. (2023). *Jambura Accounting Review Peran Sistem Pengendalian Internal dan Komitmen Perguruan*. 4(1), 1–12.
- Sihura, H. K. (2021). ANALISIS DAMPAK PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI KEPADAMASYARAKAT DALAM MENUNJANG PEREKONOMIAN AKIBAT COVID 19(Studi Kasus Masyarakat Desa Hilizihono, Kecamatan Fanayama, Nias Selatan). *Jurnal Inovasi Penelitian (JIP)*, 2(4), 1313–1316.
- Silaban, R. (2023). *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Peningkatan Kesejahteraan di Desa Lumban Purba Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan*.
- Sugiyono. 2016. *Metedologi Penelitian Bisnis*. Bandung: Aplpabeta.
- Sugiyono. 2014. *Analisis Data*.
- Zaki, A. N., Oktafiyani, M., & Yovita, L. (2023). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Tuntang: Perspektif Teori Keagenan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 23–37.